

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada permulaan tahun 2020 nyaris sebagian belahan negara di dunia termasuk di Indonesia terdampak dari munculnya penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Pada dasarnya masyarakat awam akan kesulitan mengetahui penyakit ini, karena disebabkan oleh gejala awalnya seperti flu biasa. Jika seseorang didiagnosa positif Covid-19, penyebaran virusnya akan sangat cepat pada lingkup penderita melalui percikan lendir pada saat seseorang tersebut bersin ataupun batuk, sehingga menyebabkan infeksi saluran pernafasan bahkan kemungkinan terburuk yaitu kematian. Penyakit ini muncul oleh virus Corona jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2* Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Sejak diberitakannya kasus pertama penderita Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, beragam upaya dan kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk meminimalisir penyebaran virus. Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alamiah berupa wabah penyakit yang perlu ditanggulangi (Thorik, 2020). Dengan telah menyerbarnya wabah COVID-19 *SARS-CoV-2* di Indonesia sangat mempengaruhi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali roda perekonomian dimana banyaknya para pelaku usaha yang melakukan pengurangan karyawan, PHK yang terjadi di berbagai sektor kerja, pembatasan jam operasional hingga terbatasnya aktivitas sosial mulai terasa di seluruh kehidupan. Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

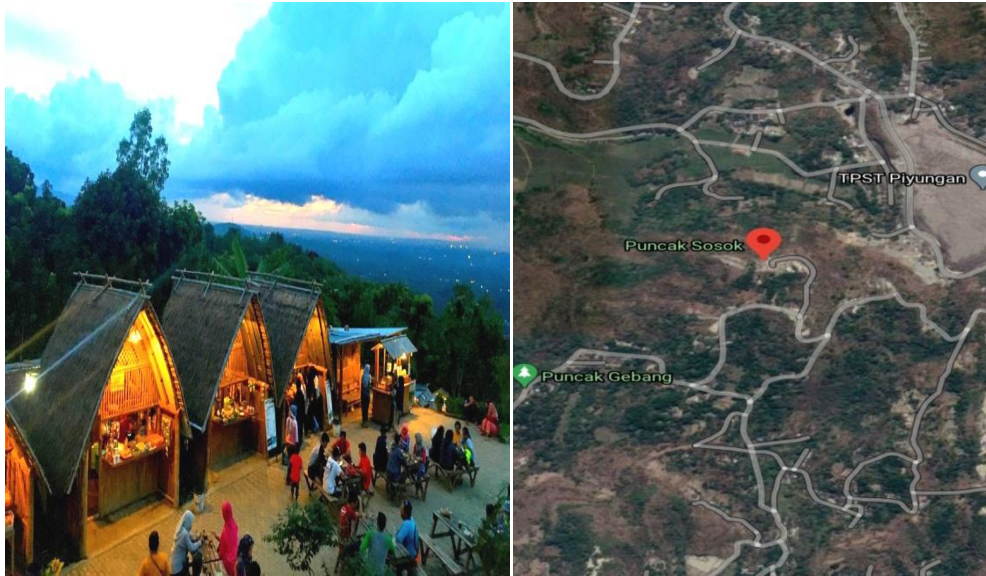
diriakan kesehatan, terutama dalam bentuk pencegahan mandiri selama masa pandemi. Pemerintah menganjurkan pembatasan kegiatan di luar rumah, peliburan sekolah dan *work from home*, peliburan perusahaan-perusahaan, transportasi, anjuran menjaga jarak fisik dan sosial, hingga pembatasan kegiatan keagamaan yang termasuk penyelenggaraan karantina yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu pentingnya penambahan kapasitas penunjang penanganan pasien COVID-19 yang terus bertambah, seperti rumah sakit dan APD yang diperlukan para tenaga medis, karena pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tolak ukur kesejahteraan sosial (Yunus & Rezki, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi juga kemerosotan ekonomi seluruh negara didunia secara signifikan (Shangguan, Wang, & Sun, 2020) sektor-sektor utama ekonomi seperti bisnis wisata, penerbangan, transportasi umum, dan lain-lain mengalami kemunduran karena sepi pengunjung dan pembatasan sosial skala besar. Melemahnya perekonomian nasional akan memunculkan akibatburuk bagi pertumbuhan ekonomi dengan tekanan yang ada, dalam kurun waktu tertentu dapat menyebabkan krisis ekonomi sektoral maupun individual (Hanoatubun, 2020). Pandemi COVID-19 memberikan perhatian khusus dari pemerintah, prioritas utama tentu saja adalah kesehatan masyarakat melalui penutupan di berbagai tempat objek wisata untuk mengantisipasi penyebarannya. Menutup tujuan objek pariwisata mulai memberi pangaruh pada industri perjalan dan pariwisata terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi. Sebagai salah satu roda penggerak perekonomian, tentu saja sektor pariwisata berpengaruh positif bagi pelaku usaha suatu objek wisata .Di Indonesia, bepergian ke salah satu objek wisata memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat (Wiwin, 2018). Semenjak kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul terus mengalami penambahan

kasus positif setiap harinya, berpergian pariwisata disaat pandemi seperti sekarang membuat sebagian orang takut untuk berkunjung ke sebuah objek wisata, tentu saja akan mempengaruhi sepiunya jumlah wisatawan yang berkunjung, ditambah lagi telah diterapkannya Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di wilayah DIY yang akan berimbas pada penurunan jumlah wisatawan. Dari data yang ada sebelum PTKM, seperti tanggal 4 Januari sampai 10 Januari 2021 kunjungan wisatawan 30.017 orang dengan pendapatan Rp. 291.161.750. Namun saat memasuki penerapan pembatasan tanggal 11 Januari sampai 17 Januari 2021 jumlah kunjungan 16.318 dengan pendapatan Rp. 158.420.500 (msn.com,2021). Penurunan ini disebabkan oleh minimnya wisatawan luar DIY yang berkunjung ditambah lagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membatasi jumlah wisatawan sebanyak 50 persen dari kapasitas destinasi wisata serta membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 WIB.

Seperti yang diketahui Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mempunyai tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi salah satunya adalah puncak sosok yang menawarkan para wisatawan untuk melihat keindahan alam Yogyakarta dari puncak ketinggian. Puncak sosok yang bertempat di Dusun Jambon RT 04, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Puncak sosok menyediakan beberapa fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung sebagai contoh ada beberapa tempat untuk lesahanmaupun kursi serta dilengkapi beberapa gazebo. Puncak sosok banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah, biaya untuk masukpun hanya sukarela dari pengunjung karena pengelola puncak sosok belum menentukan harga tiket masuk (Tribun Travel,2020). Tidak hanya itu Puncak Sosok ternyata juga masuk pada kontes API Award 2020 yang mana sudah memasuki tahap voting para nomisanasi disetiap kategori. Sejak 2016 hingga kini Anugerah Pesona Indonesia (API award) rutin diselenggarakan

setiap tahunnya, API award menjadi event besar yang ditunggu-tunggu dalam memperkenalkan dan mempopulerkan produk dan destinasi pariwisata Indonesia. Puncak Sosok menjadi satu satunya perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori dataran tinggi terpopuler di Indonesia dan bersaing dengan 8 dataran tinggi populer lainnya.



Sumber : Media sosial puncak sosok

Sejak mewabahnya virus covid-19 tentu saja berdampak pada penutupan objek wisata khususnya di Kabupaten Bantul, penutupan objek wisata ini guna mengantisipasi penyebaran virus covid-19. Hal ini akan mempengaruhi sepiunya jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Berikut initaldata jumlah pengunjung menurut bulan di Kabupaten Bantul tahun 2020, ;

**Tabel 1. Jumlah Pengunjung Objek wisata menurut bulan di Kabupaten Bantul
Tahun 2020**

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	349.800
Februari	183.866
Maret	103.828
April	-
Mei	-
Juni	21.405
Juli	165.531
Agustus	230.978
September	163.638
Oktober	161.513

November	162.272
Desember	179.005
Total	1 .721.843

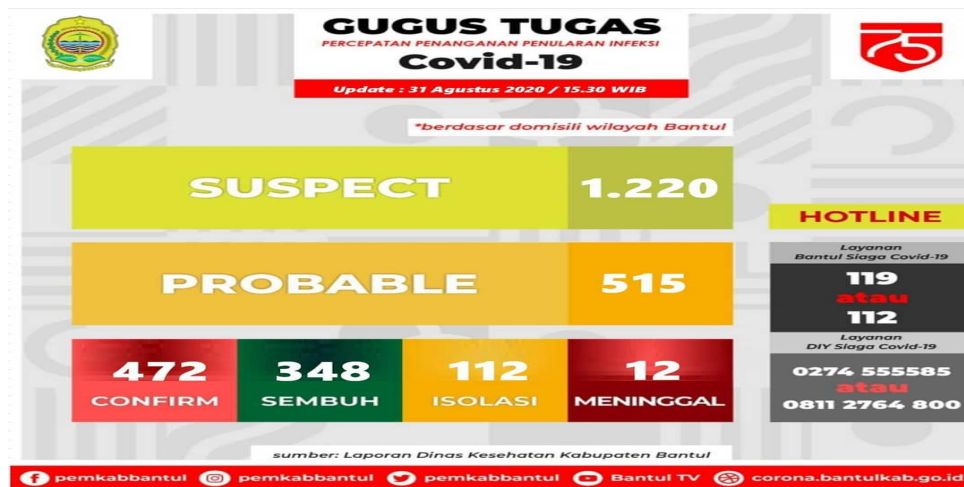
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2021

Dari table data diatas terlihat pada bulan april dan mei jumlah pengunjung yang berwisata di wilayah Kabupaten Bantul tidak ada sama sekali, hal ini terjadi karena adanya penutupan seluruh objek wisata yang berada di Bantul untuk mengatisipasi penyebaran virus covid-19, namun pada bulan juni hingga desember seiring dengan pembukaan wisata di era new normal dengan segala rangkaian kebijakan protocol kesehatan yang ketat perlahan pengunjung bertadatangan untuk berwisata, tentunya berpergian wisata saat pandemi covid-19 membuat sebagian orang masih takut untuk keluar rumah dan pergi berwisata terbukti pada bulan juni adalah titik terendah dari jumlah pengunjung yang berwisata di masa pandemi.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang status tanggap darurat Covid-19 yang mana masa tanggap darurat berakhir pada 31 Agustus, tetapi diperpanjang hingga tanggal 30 September 2020. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini Covid-19 di Bantul pada umumnya belum mengalami penurunan yang signifikan, sehingga masih membutuhkan penanganan-penanganan yang lebih dalam rangka pengendalian virus Covid-19 di Kabupaten Bantul. Helmi sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Bantul menyatakan, pemerintah daerah masih sangat membutuhkan status tanggap darurat (republika, 2020). Hal ini dilakukan agar masyarakat juga lebih konsistem untuk dapat lebih mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan guna pencegahan lebih luasya virus Covid-19. Berdasarkan data pada Gugus

Tugas Covid-19 Bantul menyatakan total kasus positif di Bantul hingga hari senin tanggal 31 Agustus 2020 berjumlah 472 orang, yang dinyatakan sembuh 348 orang, kasus positif meninggal 12 orang. Hingga saat ini pasien positif di Bantul yang masih menjalani isolasi berjumlah 112 orang, lebih kurang jelasnya lihat tampilan gambar data berikut ini ;

Tabel 2 update persebaran Covid-19 di Kabupaten Bantul



Data : <https://corona.bantulkab.go.id/>

Meski Kabupaten Bantul tidak termasuk wilayah yang diwajibkan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun sembilan kecamatan yakni Sedayu, Sewon, Banguntapan, Bantul, Pleret, Jetis, Pandak, Srandakan, dan Kretek telah menjadi zona merah Covid-19. Kesembilan kecamatan menjadi zona merah didasarkan pada peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19, dan beberapa parameter lain seperti kluster penyebaran virus Corona. Kesembilan kecamatan tersebut dianggap memiliki risiko tinggi dari hasil perhitungan bobot indikator kesehatan masyarakat sejak tanggal 22 Desember 2020-4 Januari 2021 (suarajogjaid, 2021).

Masih belum terkendalinya *Covid-19* di Bantul tentunya menjadi perhatian khusus bagi pengelola objek wisata puncak sosok untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam mengelola objek wisata puncak sosok dimasa pandemi *Covid-19* agar nantinya tidak menimbulkan kluster pada sektor objek wisata. Semenjak pandemi *Covid-19* pengelola dari puncak sosok mulai menerapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran virus corona, salah satu wujud antisipasi agar tidak terjadi kerumunan wisatawan yang akan berkunjung dari pihak pengelola melakukan penutupan sementara tempat objek wisata puncak sosok pada malam pergantian tahun baru 2021, Penutupan objek wisata puncak sosok ini dilakukan dengan berbagai aspek pertimbangan, salah satunya demi mengurangi risiko penyebaran virus *Covid-19*. Pengelola objek wisata puncak sosok tidak ingin mengambil opsi yang nantinya berakibat fatal sebab akan sulit membubarkan kerumunan pengunjung yang banyak ketika sudah berada di dalam area objek wisata. Dalam menghadapi pandemi, destinasi wisata juga dituntut untuk mampu manage dirinya bagaimana menghadapi pandemi. Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan destinasi wisata menghadapi situasi yang ada mutlak diperlukan.

Setelah sempat berhenti selama enam bulan Puncak Sosok di Jambon, Bawuran, Pleret Bantul kembali mempersiapkan diri untuk membuka kunjungan wisatawan. Rencananya pembukaan kembali tersebut akan dilakukan pada 5 September 2020. Rudi Haryanto selaku pengelola objek wisata puncak sosok mengatakan, “setelah enam bulan berhenti dan tanpa ada pemasukan, kami siap kembali untuk beroperasi” (suarajogjaid, 2020). Pihak dari pengelola sedang memfasilitasi segala bentuk sarana dan prasana yang mendukung sebagai protokol kesehatan sebagai wujud dari pencegahan virus *Covid-19*, dengan pengaturan jarak di dalam objek wisata hingga ketersediaan tempat untuk mencuci tangan. Setelah itu akan ada masa uji coba pembukaan selama dua hari guna mengamati situasi di lapangan akan kesiapan objek

wisata puncak sosok ini dalam menerapkan protokol kesehatan sebelum dibuka secara resmi. Diharapkan dengan telah dibukanya kembali objek wisata puncak sosok dapat dilirik dan dikunjungi kembali oleh wisatawan akan tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Tujuan dari pembukaan objek wisata Kabupaten Bantul salah satunya adalah membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang sudah berbulan-bulan telah terhenti akibat dari penyebaran wabah Covid-19. Berdasarkan dari kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kwintaro Heru Prabowo menjelaskan, “meski objek wisata pariwisata di Kabupaten Bantul sebagian telah banyak di buka, di harapkan nantinya para pengunjung menaati aturan protokol kesehatan salah satunya menghindari kerumunan masa” (antarajogja, 2020). Bahkan untuk pelayanan kepada wisatawan di tempat wisata tentu sesuai dengan protokol kesehatan, dengan selalu memakai alat pelindung diri (APD), mencuci tangan dengan air mengalir, serta tentunya selalu memakai masker.

Industri pariwisata harus tetap berjalan walaupun masih ada pandemi covid-19, sehingga dibutuhkan kerja sama antara wisatawan dan tempat destinasi wisata agar kasus positif covid-19 itu bisa diantisipasi lebih dahulu. Sejak di bukanya objek wisata di daerah Bantul justru banyak pengunjung yang pergi berwisata, hal ini wajar karena warga atau pengunjung yang biasanya berdiam di rumah sudah merasa jenuh dan memutuskan untuk pergi ke destinasi wisata. Akan tetapi pergi berwisata di era new normal wisatawan harus selalu taat melaksanakan protokol kesehatan, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau bisa digantikan dengan hand sanitizer yang selalu dibawa oleh wisatawan. Masih banyaknya wisatawan tidak yakin dengan adanya virus tersebut dan lalai akan mematuhi protokol kesehatan karenanya dalam upaya menekan kasus positif covid-19, pengelola destinasi wisata perlu meningkatkan kesiagaan dengan menggunakan thermo gun untuk mengecek suhu tubuh pengunjung, dan tentukan

kebijakan bagi pengunjung yang memiliki suhu tubuh tidak normal untuk tidak masuk ke kawasan wisata. Saat ini pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten Bantul masih bergulat menekan tingkat penyebaran Covid-19. Realitasnya, pelanggaran protokol kesehatan terus terjadi di berbagai tempat. Kebijakan peningkatan disiplin terkait rangkaian protokol kesehatan yang telah dibuat, ternyata belum secara penuh dapat mendisiplinkan dan meningkatkan ketaatan parawisatawan ataupun masyarakat. Maka dengan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut perihal tata kelola adaptif pariwisata di masa pandemi COVID-19 di kawasan objek wisata puncak sosok Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang muncul akibat Covid-19 dan upaya penanggulangannya di tempat objek wisata puncak sosok Kabupaten Bantul maka muncul pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan tata kelola adaptif pariwisata yang berlaku di objek wisata puncak sosok ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh tata kelola adaptif pariwisata di tempat objek wisata puncak sosok Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi tambahan bagi penelitian lainnya terkait tata kelola organisasi adaptif objek wisata di puncak sosok Kabupaten Bantul, karena persoalan ini terbilang baru dalam riset di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait penanganan Covid-19, evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul lewat dinas pariwisata selaku pembuat kebijakan dan bahan bacaan bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai tata kelola organisasi adaptif pariwisata serta bagi para pelaku objek wisata lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut (Burhanuddin & Abdi, 2020) dampak dan ancaman krisis pada bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19 hingga skala global, terutama di beberapa negara Asia. Dampak perekonomian tersebut mempengaruhi beberapa sektor, yaitu pasar saham, pariwisata, transaksi ekspor-impor dan nilai emas. Pemerintah di berbagai Negara yang terdampak Covid-19 perlu perencanaan khusus dalam menghadapi krisis yang timbul dan upaya untuk memulihkan perekonomiannya kembali. Sedangkan menurut (Hanoatubun, 2020) dan (Hadiwardoyo, 2020) dampak ekonomi dari adanya pandemic Covid-19 dengan penanganannya menyebabkan kerugian yang dibagi menjadi kerugian nasional, sektoral, perusahaan, individual dan kerugian lainnya. Diperlukan strategi untuk menyiasati kerugian, diikuti dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan

masyarakat, agar pandemi segera berakhir dan krisis dapat diatasi sebelum terjadinya kebangkrutan secara massal.

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	<p>Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Minat Masyarakat dalam Berwisata dan Sosialisasi Penerapan Protokol New Normal Saat Berwisata, Umi Farichah Bascha, Dian Yuli Reindrawati, Adiana Mutamsari Witaningrum, Dwi Setiani Sumardiko, 2020</p>	<p>Peneliti membahas persebaran COVID-19 membuat masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan wisata selama pandemi, akan tetapi setelah normal barudan diberlakukannya protokol kebersihan di tempat-tempat wisata, maka masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi mengenai pertimbangan yang perlu dipahami sebelum melakukan perjalanan wisata. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan selama berwisata dan juga memberikan bantuan perlengkapan tempat minum, tempat makan, masker, handsanitizer dan jamu tradisional Indonesia untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihandan kesehatan.</p>

2	Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik, Riska Arum, 2020	Peneliti membahas mengenai penerapan pembatasan sosial (<i>sosial distancing</i>) di Indonesia dalam sudut pandang politik. Menjelaskan dengan pemilihan dalampenanganan pandemi akan berimbas pada perekonomian di Indonesia, terutama perihal pendapatan Negara yangberkurang atau tidak adanya pemasukan dari bidang pariwisata, perusahaan, dan ekspor, sedangkan pengeluaran pemerintah sangat banyak untuk mensejahterakan masyarakat dari segi kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan.
3.	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, Dalinama Telaumbanua, 2020	Peneliti menekankan pentingnya pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Berdasarkan analisis peneliti, urgensi pembentukan aturan dalam penanganan Covid-19 dirangkum dalam 5 bentukPeraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan. Kedua jenis peraturan ini harus ada, sebagai penunjang kebijakan penanggulangan pandemi dan berisi aturan hukum dalam pelaksanaannya.
4	Dampak Covid-19 Terhadap	Penelitian ini menjelaskan beberapa dampak dan

	Perekonomian Indonesia, Silpa Hanoatubun, 2020	kerugian pada perekonomian Indonesia akibat adanya Covid-19. Peneliti berasumsi mengenai krisis yang akan terjadi akibat pandemi, dan strategi ideal untuk menghadapinya.
5	Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, Wibowo Hadiwardoyo, 2020	Penelitian ini menjelaskan kerugian-kerugian di bidang ekonomi secara nasional akibat Covid-19 dan kebijakan PSBB. Kerugian dibagi menjadi kerugian nasional, sektoral, perusahaan, individual dan kerugian lainnya. Peneliti juga memberikan strategi untuk menyasati kerugian, diikuti dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar pandemi segera berakhir dan krisis dapat diatasi sebelum terjadinya kebangkrutan secara massal.
6	Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19), Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, 2020	Jurnal ini menjelaskan mengenai dampak dan ancaman krisis pada bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19 dalam skala global, terutama di beberapa negara Asia. Dampak perekonomian tersebut mempengaruhi beberapa sektor, yaitu pasar saham, surat utang, transaksi ekspor-impor dan nilai emas. Pemerintah di berbagai Negara yang terdampak Covid-19 perlu perencanaan khusus dalam menghadapi krisis yang timbul

		dan upaya untuk memulihkan perekonomiannya kembali.
7.	Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Adelia Rachma Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi, dkk, 2020	Dalam tulisan ini mencakup penjelasan dan kritik mengenai keputusan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan sudut pandang politik hukum. Penelitian ini mengupas secara tuntas dengan pembahasannya yang meliputi permasalahan instrument hukum, transparansi, penetapan status wilayah, pembebasan narapidana hingga kinerja DPR dalam penanganan pandemi. Diharapkan adanya koordinasi yang baik dari pemerintah pusat, Gugus Tugas, maupun dengan pemerintah daerah tidak terjadi perbedaan data maupun perumusan kebijakan yang dapat menghambat kinerja masing-masing.
8.	Pemulihan Fungsi Alam Pariwisata Ditengah Pandemi Covid-19, I Gusti Ketut Indra Pranata Darma, Ni Made Rai Kristina, 2020	Penelitian ini menyatakan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu industri yang cukup tergantung terhadap ketersediaan alam. Bertubarannya destinasi wisata yang menggunakan alam sebagai objeknya menunjukkan bagaimana peran alam terhadap perkembangan pariwisata. Eksploitasi terhadap alam juga tidak jarang kita

		<p>jumpai pada beberapa objek wisata tertentu.</p> <p>Adanya pariwisata secara tidak langsung akan mendatangkan wisatawan dari berbagai Negara, sehingga terjadi suatu perjalanan wisata. Perjalanan wisata dengan berbagai macam moda transportasi berperan serta dalam mencemari alam dan sekitarnya. Hingga pandemi covid-19 yang merubah hampir seluruh jenis kegiatan industry di dunia tidak terkecuali industry pariwisata</p>
9	<p>Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata, Moh Agus Sutiarmo, 2017</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait pengembangan pariwisata dilakukan dalam rangka meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan merupakan usaha secara berencana dan terstruktur. Arah, kebijakan, strategi dan program pengembangan pariwisata harus dibuat selaras dan sinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nasional, agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan kepariwisataan</p>
10	<p>Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam</p>	<p>Penelitian ini memandang dari segi pertimbangan dari perspektif kesehatan masyarakat tentang pencegahandan kontrol covid-19 untuk sektor pariwisata diperlukan sebagaipendekatan yang</p>

	<p>Menghadapi NewNormal Pasca Pandemi Covid-19, Amin Kiswanto, Hendra Rohman, Dwiyono Rudi Susanto, 2020</p>	<p>direkomendasikan untuk diambil oleh sektor pariwisata. Kegiatan pengabdian yang bertujuan masyarakat dilakukan dengan menyerahkan beberapa peralatan untuk pencegahan penyebaran covid-19 dalam menyambut kondisi new normal di destinasi wisata, yang dapat digunakan oleh anggota Pokdarwis dalam melayani wisatawan</p>
11	<p>Pengelolaan Mitigasi Krisis Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Menghadapi Fase New Normal (Studi Kasus Di Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta), Hendry Ferdiansyah, Dadang Suganda, Evi Novianti & Ute Lies Khadijah, 2020</p>	<p>Coronavirus (COVID-19) yang mewabah dengan sangat cepat menjadi salah satu krisis dunia yang sangat mempengaruhi sektor Pariwisata. Pembatasan sosial yang menjadi langkah pertama Pemerintah untuk mencegah meluasnya pandemi ini menjadi dilema besar bagi para pelaku usaha wisata. Desa Wisata Nglanggeran, salah satu destinasi wisata unggulan DIY menjadi salah satu contoh objek yang mengalami keterpurukan karena hal tersebut.</p>
12	<p>Analisis Perilaku Konsumen Wisatawan Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pariwisata di Nusa Tenggara Barat), Wiwik</p>	<p>Kekhawatiran akan terpapar dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, membuat wisatawan baik domestik maupun mancanegara membatalkan perjalanannya. Keterpurukan ekonomi ditengah ancaman penyebaran pandemi</p>

	Suprihatin, 2020	yang belum diketahui kapan akan berakhirnya ini, menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kini, kegiatan ekonomi kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan penyebaran virus. Mengembalikan lagi kepercayaan wisatawan sangat dibutuhkan, ditengah kecemasan dan kebutuhan untuk berwisata
13	New Normal Bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid-19, Ida Bagus Gede Paramita1 ,I Gede Gita Purnama Arsa Putra ,2020	Pandemi covid 19 merupakan wabah yang merubah tatanan kehidupan masyarakat diseluruh dunia atau disebut dengan new normal. Masyarakat diwajibkan hidup dalam new normal untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa mereka. Covid 19 berdampak sangat berat bagi perekonomian terutama yang mengandalkan perekonomian dalam sektor pariwisata. Belum ditemukannya antivirus untuk covid 19 ini menambah kecemasan masyarakat untuk beraktivitas. Untuk itulah pemerintah mengambil kebijakan penerapan kehidupan new normal dalam menjalankan aktivitas biasa di luar rumah dengan menerapkan protokol tetap pencegahan penyebaran covid 19.
14	Komunikasi Ekstra	Menunjukkan bahwa di tengah bayang-bayang

	<p>Normal Dalam Membangun Pariwisata Budaya di Era New Normal, Putu Agus Aryatnaya Giri, I Made Girinata, I Ketut Wiratmaja,2020</p>	<p>angka positif Covid-19 di era new normal yang masih sangat tinggi, keinginan masyarakat untuk melepas penat dan berwisata melihat keindahan alam dan budaya Indonesia setidaknya dapat diwujudkan dengan penerapan aturan-aturan yang ketat dan pada akhirnya geliat masyarakat sektor pariwisata setidaknya dapat terlihat dan mewujudkan optimisme pada sektor-sektor produktif lainnya. Meskipun begitu, tantangan seperti yang datang dari masyarakat itu sendiri yang kadang tidak taat dengan aturan. Karena, pariwisata era new normal memang membutuhkan komunikasi ekstra normal dari pemerintah</p>
15	<p>Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal, Ni Made Rai Kristina,2020</p>	<p>Terjadinya pandemik Covid-19 hampir diseluruh dunia, mempengaruhi seluruh sektor kehidupan tak terkecuali Indonesia. Bali yang merupakan provinsi yang mengandalkan kegiatan ekonomi dari sektor pariwisata mengalami keterpurukan perekonomian. Diperlukan waktu yang lama untuk kembali meningkatkan ekonomi pariwisata Bali. Maka dari itu mulai 9 Juli pemerintah provinsi Bali menerapkan kebijakan New Normal. Kebijakan ini</p>

		diterapkan bekerjasama dengan seluruh lini serta komponen masyarakat Bali seperti desa adat.
--	--	--

F. Kerangka Teori

1. Tata Kelola Destinasi Wisata

Terminologi pariwisata terdiri dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak atau berkali-kali dan “wisata” yang berarti berpergian Suwanto, 2001. Soekadijo, 2000 mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan di dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan, sedangkan Wahab, 2003 mengemukakan bahwa pariwisata merupakan aktivitas perpindahan sementara yang mempunyai pola hidup berbeda, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Didasarkan kepada pemahaman pariwisata tersebut di atas, (Yoeti, 2008) mengemukakan bahwa pariwisata harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: Pertama, perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua, tujuan untuk bersenang-senang. Ketiga, adanya uang yang dibelanjakan. Keempat, waktu perjalanan setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari unsur pemerintah-swasta dan masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan

misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (sustainable tourism) dan berwawasan lingkungan hanya dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (good tourism governance). Bambang Sunaryo (2013:77-81) mengatakan bahwa prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik yaitu dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar stakeholder, serta dengan pelibatan partisipasi aktif yang bersinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terkait.

Menurut (Abdurrahman, 2014), dalam dua dekade terakhir pada perspektif internasional menunjukkan bahwa pola pengelolaan kolaboratif dalam konteks pariwisata semakin mengemuka. Pola ini disebut pula Destination Management Organization (DMO). Pola tersebut dinilai cukup ampuh karena melibatkan langsung semua pihak yang terkait pemangku kebijakan dan kepentingan dalam proses pembangunan pariwisata. DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang dipimpin secara terpadu dengan peran masyarakat, pelaku atau asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama.

2. Pariwisata Dimasa Pandemi

Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada awal Maret tahun 2020 (Ihsannudin, 2020 dalam Nasional Kompas). Sejak saat itu pandemi ini cepat menyebar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 lalu

(WHO). Virus ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Adapun penyebaran COVID-19 sangat berdampak bukan hanya pada kegiatan ekonomi dan bidang transportasi tetapi juga pada dirasakan oleh industri pariwisata. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah 1.111.671 per tanggal 3 Februari 2021 (News Google, 2021). Jumlah ini terus mengalami kenaikan dari hari ke hari dibuktikan dengan bentuk kurva yang cenderung masih menanjak. Adanya pandemi ini menyebabkan penurunan yang signifikan terkait jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini tentunya menyebabkan industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan adanya penutupan akses bagi turis-turis mancanegara dan diberlakukannya kebijakan penutupan objek wisata itu sendiri. Kebijakan penutupan objek wisata dilakukan guna meminimalisir adanya klaster baru penyebaran COVID-19.

Adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak penyebaran Virus telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar penyebaran virus terkendali. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif COVID-19. Berbagai tempat wisata banyak ditutup yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Tatanan normal baru adalah sebuah perubahan budaya hidup agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Industri pariwisata perlu mempersiapkan new normal pasca pandemi covid-19. Protokol kesehatan wajib diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di beberapa wilayah, masyarakat telah memulai menggerakkan

kembali roda perekonomian yang sempat lumpuh akibat diterapkannya sistem physical distancing.

Dengan telah dibukanya kembali sejumlah objek wisata tentu juga harus dibarengi dengan kepatuhan pengunjung ataupun masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta kesiapan dari tujuan objek wisata dalam memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang guna menjalankan protocol kesehatan. Peran pemerintah sebagai ujung tombak dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19 harus bertindak tegas terhadap sanksi yang diterapkan, apabila terdapat masyarakat yang masih nakal dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sanksi ini perlu diterapkan karena jika tidak masyarakat akan lengah dan tidak waspada dalam artian menganggap new normal seperti kehidupan biasa sebelum adanya pandemi *Covid-19*.

3. Tata Kelola Adaptif

Tata kelola adaptif telah muncul dalam dekade terakhir sebagai jalan yang menarik dari teori dan praktek untuk manajemen holistik masalah lingkungan yang kompleks (Bevir, 2012; Schmidt, et al 2013; Sharma-Wallace, Velarde, & Wreford, 2018). Tanpa mengabaikan tradisi, pendekatan baru perlu dianut yang mengakui bahwa berbagai program pemerintah semakin diperebutkan. Proposisi ini dapat bermanfaat dan dikelompokkan dalam kerangka kerja konseptual pengelolaan adaptif (Lee & Petts, 2013; Sharma-Wallace, Velarde, & Wreford, 2018). Tata kelola adaptif melibatkan dan mengarahkan kinerja ke arah pencapaian hasil dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Pemantauan masih akan diperlukan untuk memastikan tidak hanya hasil sedang dicapai, tetapi bahwa proses yang diupayakan memiliki integritas dan akuntabilitas yang dituntut oleh publik.

Tata kelola adaptif menuntut fleksibilitas organisasi yang lebih besar, menuntut lebih banyak kemauan untuk bereksperimen mulai dari yang kecil, menguji apa yang berhasil dan gagal dengan cepat. Hal ini dapat dilakukan oleh kepemimpinan fasilitatif, dimana kemitraan kolaboratif dibentuk dengan orang lain untuk memberikan hasil yang lebih baik. Dibutuhkan ketangkasan yang jauh lebih besar dari pada yang diizinkan oleh struktur organisasi tradisional, dan menuntut pemerintah agar dapat lebih baik terlibat dengan masyarakat. Juga tata Kelola mengacu pada pengaturan kelembagaan yang membentuk keputusan aktor dan perilaku kebijakan, termasuk pelaksanaan kewenangan dalam kelompok atau organisasi.

Lebih lanjut pengelolaan adaptif menganalisis berbagai aspek yang membangun tata kelola multi level dan bagaimana semua aspek membantu membangun ketahanan terhadap perubahan global. Untuk itu para sarjana menekankan perlunya bentuk tata kelola yang fleksibel, terintegrasi, dan holistik yang dapat menangani kompleksitas sosial ekonomi (Sharma-Wallace, Velarde, & Wreford, 2018). Tata kelola adaptif menyiratkan lebih dari partisipasi pemangku kepentingan dan perencanaan terpadu dengan menggabungkan berbagai jalan analisis seperti manajemen adaptif, pengelolaan bersama adaptif, pengelolaan ekosistem, dan berbagai bentuk pengelolaan sumber daya yang terintegrasi formal dan informal.

Menurut (Malone et al 2009:46) mengidentifikasi delapan faktor penentu kapasitas adaptif sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi yang tersedia untuk melakukan adaptasi;
- b. Ketersediaan sarana prasarana dan distribusinya pada seluruh lapisan masyarakat
- c. Keberadaan lembaga yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan adanya kriteria tentang pilihan keputusan yang akan digunakan

- d. Kemampuan pengambil keputusan untuk mengelola informasi, termasuk proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang kredibel, serta kredibilitas dari pengambil keputusan itu sendiri;
- e. Kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga yang memiliki otoritas pengambilan keputusan.
- f. Kualitas sumber daya manusia;
- g. Keberadaan modal sosial, termasuk mekanisme pelibatannya dalam sebuah lembaga;
- h. Akses sistem untuk menjalankan proses penyebaran pengetahuan tentang risiko dengan membangun kolaborasi.

4. Tata Kelola Adaptif Destinasi Wisata di Masa Pandemi

Wabah covid-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata. Pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak, dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik, dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia (Sugihamretha, 2020). Hingga sekarang relatif masih sedikit studi tentang bagaimana terjadi pergeseran dalam model pemerintahan dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat, bencana merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan membawa dampak yang besar terhadap pariwisata. Adaptasi dilakukan dengan penyesuaian kebijakan dan mengelola ketidak pastian yang disebabkan oleh bencana agar pariwisata masih tetap bisa berjalan (Nurmaladewi, 2012). Menurut (Eakin dan Lemos, 2006) kemampuan adaptif ini terutama dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan dan untuk memberikan

pengaturan kelembagaan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan, hal ini telah meningkatkan minat dalam menentukan bentuk yang tepat dari pemerintahan untuk adaptasi yang efektif. Studi lain tentang adaptasi sudah dilakukan oleh (Eakin, et.al, 2011:338-351) dalam konteks perubahan iklim. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga dan organisasi masyarakat dalam membangun kapasitas adaptasi terletak pada faktor-faktor seperti kendala pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor politik, kesesuaian antara tanggung jawab lembaga dengan ekosistem, dan pengambilan keputusan untuk memfasilitasi masyarakat beradaptasi.

5. Definisi Konseptual

1. Tata Kelola Destinasi Wisata

Pariwisata ialah salah satu zona terbanyak di dunia selaku pembangkit ekonomi, tetapi keberadaannya sangat rentan terhadap musibah baik yang diakibatkan oleh alam ataupun manusia itu sendiri. Pariwisata merupakan industri yang senantiasa di hantui oleh krisis serta musibah, apalagi dapat dikatakan sangat sensitif serta rapuh sebab sangat gampang buat dipengaruhi oleh perubahan- perubahan ataupun kejadian- kejadian yang terdapat di sekelilingnya. yang sangat berarti sebab keputusan berpegian wisata diawali dari hasrat manusia, sebagian besar manusia hendak melaksanakan ekspedisi wisata apabila destinasi yang didatangi terbebas dari musibah, kendala keamanan serta pasti untuk bersenang senang. Tidak hanya itu, musibah ialah peristiwa yang tidak terduga dan tidak bisa dihindari timbul dalam wujud serta keseriusan yang berbeda, oleh sebab itu kebangkitan pariwisata diisyarati dengan kompleksitas serta sebagian kriteria yang berlawanan dengan musibah. Dalam pengelolaan destinasi wisata dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional untuk mendapatkan nilai lebih dari pembangunan

pariwisata yang dilakukan. Dalam rangka memadupadankan berbagai potensi yang ada di kawasan destinasi tersebut, Maka dibutuhkan tata kelola yang tepat. Untuk itulah kemudian, manajemen pengorganisasian terhadap sebuah destinasi pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan semata, melainkan suatu tata kelola yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat lokal.

2. Pariwisata Di Masa Pandemi

Dengan adanya wabah yang melanda dunia pariwisata perlu adanya penanganan yang tepat sehingga mampu mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan. Semacam yang kita tahu dengan terbatasnya ruang gerak manusia sepanjang pandemic membuat para aktor dalam perihal ini tercantum pemerintah pusat serta wilayah, investor, dan pengelola objek wisata diwajibkan menanggapi tantangan menyelamatkan sektor pariwisata ditengah pandemi virus COVID- 19. Dengan serangkaian problem yang dialami hingga muncullah inisiatif baru berbentuk terobosan berangkat melancong dengan nyaman di masa pandemi. Pemerintah pusat mengajak dan himbauan kepada warga supaya berangkat melancong di dalam negara saja, salah satu triknya dengan menggaungkan kampanye tagar #DiIndonesiaAja. Dengan tujuan supaya aliran dana mengkonsumsi warga berputar di dalam negeri. Perihal ini berjalan dengan baik bila diiringi dengan jaminan rasam yang nyaman untuk wisatawan maupun warga yang mau berkunjung di tengah pademi.

3. Tata Kelola Adaptif

Reaksi yang sangat cepat dalam mengalami pergantian yang diakibatkan musibah merupakan dengan mempraktikkan prinsip adaptif governance. Secara universal praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di negeri industri ataupun di Negara berkembang sudah dipengaruhi oleh prinsip- prinsip “ Good Governance”, memanglah telah banyak riset tentang tata kelola menyesuaikan diri dari governance tetapi sebagian besar dalam rangka merespon pergantian kebijakan. Adaptasi dilakukan dengan penyesuaian kebijakan dan mengelola ketidak pastian yang disebabkan oleh bencana agar pariwisata masih tetap bisa berjalan. Kemampuan adaptif ini terutama dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan dan untuk memberikan pengaturan kelembagaan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan hal ini telah meningkatkan minat dalam menentukan bentuk yang tepat dari pemerintahan untuk adaptasi yang efektif.

4. Tata Kelola Adaptif Destinasi Pariwisata di Masa Pandemi

Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa cepat pemulihan pariwisata di era new normal. Respon kebijakan yang tepat di bidang pariwisata, kondisi psikologis positif masyarakat untuk kembali berwisata, dan kesiapan masyarakat di destinasi pariwisata adalah tiga hal yang utama. Wisatawan akan yakin melakukan perjalanan, jika ada jaminan dari pemerintah bahwa destinasi pariwisata siap menerima wisatawan dengan protokol kesehatan, kebersihan dan keamanan. Kondisi psikologis masyarakat dapat membaik melalui penurunan angka pasien Covid-19 dan penemuan vaksin Covid-19. Selanjtnya pengelolaan destinasi wisata sangat membutuhkan dukungan masyarakat setempat, karena disamping menyiapkan fasilitas fisik sesuai protokol kesehatan, yang juga amat penting adalah kesiapan masyarakat lokal menjaga kebersihan dan

keamanan. Akhirnya, kesiapan stakeholders bidang pariwisata, mulai dari pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata (swasta atau pengelola wisata, dan masyarakat) menjadi kunci new normal.

6. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional pada penelitian ini mengacu pada teori (Malone et al, 2009:46) mengidentifikasi delapan faktor penentu kapasitas adaptif yang meliputi:

Variabel	Indikator
Penggunaan Teknologi	<ul style="list-style-type: none">a. Penggunaan media sosial yang dapat menjadi media promosib. Penggunaan internet berbasis website
Ketersediaan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none">a. Ketersediaan fasilitas disekitar objek wisata
Keberadaan lembaga	<ul style="list-style-type: none">a. aspek keberadaan struktur organisasi masyarakat
Kemampuan mengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none">a. Proses yang terdiri dari pengendalian kegiatan-kegiatan
Kepercayaan publik	<ul style="list-style-type: none">a. Membangun kepercayaan publik dengan beradaptasi

Kualitas SDM	a. Peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan suatu usaha dan terencana
Keberadaan modal sosial	a. Memfasilitasi tindakan terkoordinasi yang saling menguntungkan dengan aksi kolektif
Akses sistem	a. Menjalankan aspek kolaborasi antar <i>stakeholder</i>

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut *Ristekdikti* adalah penelitian yang dalam melakukan riset menggunakan data deskriptif. Data deskriptif digunakan untuk menyelidiki suatu masalah berdasarkan objek ataupun subjek sesuai dengan kenyataan dilapangan. Metode kualitatif diawali dengan membuat hipotesis dan aturan beripikir untuk dioalh dalam risetnya. Setelah data terkumpul barulah data-data tersebut ditafsirkan. Dalam penulisan paper ini, peneliti mengumpulkan data - data yang didapat dari berbagai sumber seperti dari buku,jurnal,dan beberapa sumber lainnya yang dikaji. Selain itu juga sumber yang didapat ada dalam peraturan perundan-undangan yang berlaku & adapun sumber lain yang didapat melalui internet seperti berita.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di objek wisata Puncak Sosok Kabupaten Bantul lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena objek wisata puncak sosok Kabupaten Bantul ini tetap buka di masa pandemi Covid-19 yang akan berdampak pada berdatangnya wisatawan untuk berkunjung, pengelolaan objek wisata puncak sosok tentu harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru yaitu dengan adanya protokol kesehatan yang harus di patuhi oleh pengelola dan pengunjung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung pada saat peneliti terjun langsung ke lapangan. Contoh pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara. Untuk itu peneliti mendapatkan data untuk diteliti melalui wawancara dan kunjungan langsung ke objek wisata Puncak Sosok dengan menemui perwakilan dari pihak pengelola objek wisata Puncak Sosok. Peneliti memilih wawancara karena dengan wawancara kita bisa mendapatkan informasi akurat dan langsung dari orang yang bersangkutan mengenai tata kelola objek wisata Puncak Sosok di masa pandemi Covid-19.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui referensi ataupun bahan bacaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Contoh data sekunder yaitu jurnal ataupun studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain dari studi terdahulu peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui berita online karena berita online lebih aktual dan spesifik mengenai penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa informasi mengenai pengelolaan objek wisata di masa pandemi covid-19.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu bagian terpenting dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif karena dari wawancara yang dilaksanakan tersebut peneliti mendapatkan informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara lisan kepada responden yang memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara akurat dalam suatu penelitian. Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat.

Wawancara menjadilah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data karena pada wawancara kita bisa mendapatkan informasi yang relevan secara langsung dari informan. Wawancara dapat memberkan data yang akurat dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara dengan ketua dan divisi pengembangan dari pengelola objek wisata Puncak Sosok untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ada beberapa data yang dibutuhkan dalam wawancara ini yaitu bagaimana penerapan tata kelola adaptif puncak sosok dimasa

pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Puncak sosok selama pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti menetapkan informan kunci kemudian akan berlanjut informan lain untuk melengkapi informasi (Snowball Samplig) berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ;

Tabel 3. data informan wawancara

No	Informan	Unsur
1	Ketua POKDARWIS	Pengelola Puncak Sosok
2	Divisi Pengembangan Puncak Sosok	Pengelola Puncak Sosok
3	Pengunjung objek wisata Puncak Sosok	Perwakilan wisatawan di objek wisata Puncak Sosok
4	Anggota Satgas Covid Desa Bawuran	Perwakilan dari Satgas Covid desa Bawuran

b. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang berasal dari sumber data tertulis dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dapat digunakan untuk menguji menafsirkan serta untuk meramalkan (Moleong 2000). Dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata di era new normal.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian memilih data yang terpenting dan memilih data yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan dari data tersebut, Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari buku penelitian kualitatif (Alhamdi, Ridho, sakir, Suswanta, Eko, Muhammad, Efendi, 2020).dalam hal ini terdapat 4 teknik analisis data antara lain:

1. Pengumpulan dan pengelolaan data

Pada tahap pertama setelah selesai pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dilanjutkan dengan mengelola data-data tersebut yang didapatkan saat penelitian. Pada tahap ini, harus melakukan proses penyalinan dari rekaman wawancara menjadi teks atau berupa transkrip. Dalam teknik pengumpulan data dokumentasi berupa data dokumen, laporan, gambar serta keterangan yang mendukung penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan wawancara, peneliti sudah menetapkan narasumber yang akan di

wawancara yaitu pengelola objek wisata Puncak Sosok, pengunjung, serta Satgas *Covid-19* Desa Bawuran.

2. Seleksi data

Seleksi Data merupakan memilih dan memilah data yang berguna dan relevan untuk digunakan dalam menganalisis, data tersebut berupa data deskripsi ataupun data tabel dan gambar, serta menyisihkan data-data yang dianggap kurang relevan.

3. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

Pada tahap analisis antar-variabel peneliti harus bisa menyambungkan temuan satu variabel dengan variabel lainnya, penyajian data berupa tabel atau gambar sangat mendukung dalam temuan penelitian. Setelah itu melakukan verifikasi data, tahap ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian apakah data ini benar, akurat, dan cocok dengan data yang sudah ada terlebih dahulu. Penyajian data dilengkapi dengan bukti berupa tabel, gambar, kutipan wawancara, hasil observasi atau data angket. Dalam hal ini peneliti menggunakan delapan variabel penentu faktor kapasitas adaptif destinasi wisata di objek wisata puncak sosok. Peneliti menghubungkan keterkaitan indikator satu ke indikator lainnya. Setelah itu peneliti melakukan verifikasi data kepada narasumber tentang kebenaran data yang didapat.

4. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Penafsiran merupakan usaha untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis antar-variabel dan verifikasi data. Hasil dari penafsiran data digunakan sebagai dasar untuk ditarik kesimpulan. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran data, sehingga dapat memberikan gambaran kepada pembaca, penelitian ini mengenai tata kelola adaptif

destinasi pariwisata pada masa pandemik di objek wisata Puncak sosok Kabupaten Bantul. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan dari penafsiran data.